

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh:

NAMA : LILIS NUR ANISA
NOMOR POKOK : E.1635222790
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINITRASI NEGARA

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG
2020**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

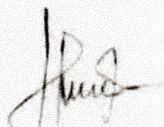
Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI KECAMATAN
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi:

Pembimbing I,



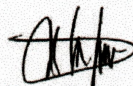
Suherman, Drs., M. Si.
NIDN. 04-1603-6702

Pembimbing II,



Dadang Suhendi, S. Sos., M. Si.
NIDN. 99-0401-6339

Mengetahui,
Ketua STIA Sebelas April Sumedang



Rika Kusdinar, S. Sos., M. Si.
NIDN. 04-3012-7102

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

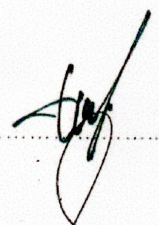
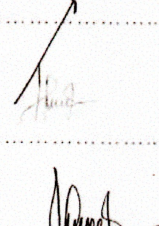
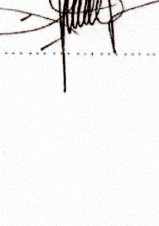
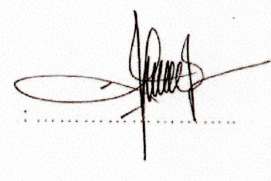
Nama : LILIS NUR ANISA
NPM : E.1635222790
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Menggunakan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Di
Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang

Telah mempertahankan Skripsi dihadapan panitia penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Agustus 2020
Pukul : 08.00 s.d Selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI SKRIPSI:

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si. : 
Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si. : 
Pembimbing I : Suherman, Drs., M.Si. : 
Pembimbing II : Dadang Suhendi, S.Sos., M.Si. : 

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

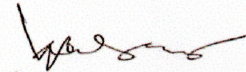
Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI KECAMATAN
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG**

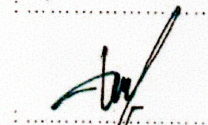
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Penguji Skripsi:

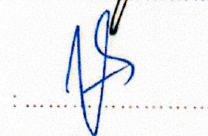
Penguji I : Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd.



Penguji II : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si.



Penguji III : Hj. Fepi Febianti, S.Sos., M.I.Kom.



LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini teruntuk:

Allah SWT. & Rasulullah SAW

Ya Allah. Engkaulah Dzat yang telah menciptakanku, memberikan karunia dan nikmat yang tidak terhingga, melindungiku, membimbingku, dan mengajarku dalam arti kehidupan. Serta wahai engkau ya Rasulullah ya habiballah yang telah memberiku pengetahuan akan ajaran Tuhanku dan membawaku keluar dari jurang kejahiliyahan menuju kehidupan yang terang berderang ini.

Ayah dan Ibu Tercinta

Ayah dan Ibu yang selalu mendoakanku, yang selalu berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih sayangnya dengan tulus, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat bagi anakmu ini supaya tetap semangat dan tak kenal putus asa.

Saudaraku tercinta Asep Septia Nur Ramadhan

Saudara kecilku yang senantiasa membantu kakakmu ini dalam segala hal, yang selalu mendukung dan memberikan semangat.

Dosen yang menginspirasi

Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang, Dosen

Pembimbing: Bapak Suherman, Drs., M.Si., dan

Bapak. Dadang Suhendi, S.Sos., M.Si.

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG”** ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penipuan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak baik yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dipatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, 09 Agustus 2020
Penulis

LILIS NUR ANISA
NPM. E.1635222790

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh

Nama : LILIS NUR ANISA

NPM : E.1635222790

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

132 Halaman, 5 Bab, 36 Tabel, 4 Gambar, 8 Lampiran

Daftar pustaka: 8 Buku, 9 Jurnal, 4 Dokumen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode *naturalistik*, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dan lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan secara deskriptif. Yang menjadi informan adalah Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Program dan Keuangan, Bendahara, dan Pelaksana Sistem/Operator Sistem.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hambatan yakni kurangnya sumber-sumber pendukung seperti sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, serta pemahaman pelaksana yang belum optimal mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Upaya agar implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berjalan dengan baik adalah sebagai berikut: meningkatkan fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut, memberikan study banding, motivasi atau dorongan terhadap pelaksana guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Saran agar implementasi tersebut berjalan dengan baik adalah sebagai berikut: meningkatkan fasilitas atau sarana dan prasarana, adanya usaha yang keras dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas pengeimplementasian kebijakan tersebut, dan meningkatkan pemahaman bagi para pelaksana terkait kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 58 OF 2005 CONCERNING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT USING A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM REGIONAL FINANCE (SIPKD) IN CONGGEANG DISTRICT SUMEDANG REGENCY

Arranged by

Name : LILIS NUR ANISA

NPM : E.1635222790

Study Program : State Administration Science

132 Pages, 5 Chapters, 36 Tables, 4 Pictures, 8 Appendices

Bibliography: 8 Books, 9 Journals, 4 Documents

This study aims to determine the implementation of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management using the Regional Financial Management Information System (SIPKD) in Conggeang District, Sumedang Regency. This research uses qualitative research methods or often referred to as naturalistic methods, because the research is carried out in natural conditions and is easier to adjust to the realities faced in the field descriptively. The informants are the Camat, the Secretary of the Sub-District, the Head of the Program and Finance Subdivision, the Treasurer, and the System Implementer / System Operator.

Based on the research results, that the implementation of the policy has been going well, but there are still obstacles, namely the lack of supporting resources such as facilities and infrastructure as well as human resources, as well as the understanding of the implementers who are not yet optimal about the implementation of the policy.

Efforts to ensure that the implementation of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management using the Regional Financial Management Information System (SIPKD) runs well are as follows: improving the facilities or facilities and infrastructure used in implementing the policy, providing comparative studies, motivation or encouragement towards the implementer in order to increase knowledge and understanding of the implementation of the policy.

Suggestions for implementation to run well are as follows: improving facilities or facilities and infrastructure, the hard work of the policy implementers in carrying out the tasks of implementing the policy, and increasing understanding for the implementers regarding the policy.

Keywords: Policy Implementation, Government Regulation Number 58 Year 2005 concerning Regional Financial Management, and Regional Financial Management Information System (SIPKD).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.”

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran, serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas Skripsi ini. Ucapan terimakasih ditunjukkan terutama kepada:

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang.
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd., selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si., selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Bapak Suherman, Drs., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

7. Yth. Bapak Dadang Suhendi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah membekali ilmu selama mengikuti perkuliahan.
9. Yth. Seluruh Staf Tata Usaha Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
10. Yth. Bapak Camat Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.
11. Yth. Seluruh Pegawai Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.
12. Kerabat dan keluarga, Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian studi ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan, bantuan, nasehat dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Sumedang, Desember 2019
Penulis,

LILIS NUR ANISA
NPM. E.1635222790

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
1. Hakekat Administrasi Negara	9
2. Ruang Lingkup Administrasi Negara	11
3. Implementasi Kebijakan Merupakan Bagian Dari Administrasi Negara	14
B. Kebijakan Publik	16

1. Pengertian Kebijakan	16
2. Pengertian Kebijakan Publik	18
3. Formulasi Kebijakan Publik	19
C. Implementasi Kebijakan	21
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	21
2. Model Implementasi Kebijakan	23
3. Hambatan Implementasi Kebijakan	27
4. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan	28
D. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKADE) ...	29
F. Kajian Penelitian Terdahulu	31
G. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Instrumen Penelitian	35
1. Kerangka Pemikiran	35
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	41
B. Penentuan Sasaran, Informan dan Narasumber Penelitian	45
1. Penentuan Sasaran	45
2. Informan dan Narasumber Penelitian	46
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Prosedur Pengolahan Data	49
E. Lokasi dan Jadwal Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	53
2. Visi dan Misi Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	55
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	57

4. Strategi dan Kebijakan	58
5. Keadaan Pegawai Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	58
B. Karakteristik Sasaran Penelitian	60
C. Hasil dan Pembahasan Penelitian	62
1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	62
a. Indikator Komunikasi	63
b. Indikator Sumber Daya	74
c. Indikator Disposisi	86
d. Indikator Struktur Birokrasi	93
2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	99
a. Indikator Isi Kebijakan	99
b. Indikator Informasi	104
c. Indikator Dukungan	107
d. Indikator Pembagian Potensi	111
3. Upaya-upaya dalam Mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	114
e. Indikator Isi Kebijakan	114
f. Indikator Informasi	120

g. Indikator Dukungan	122
h. Indikator Pembagian Potensi	124
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	32
Tabel 2.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	39
Tabel 3.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian	46
Tabel 3.2 Informan Penelitian	47
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	51
Tabel 4.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan	59
Tabel 4.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pejabat Struktural dan Fungsional	60
Tabel 4.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja	60
Tabel 4.5 Sasaran Penelitian	61
Tabel 4.6 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 1	65
Tabel 4.7 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 2	68
Tabel 4.8 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 3	72
Tabel 4.9 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 4	75
Tabel 4.10 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 5	79
Tabel 4.11 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 6	81
Tabel 4.12 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 7	83
Tabel 4.13 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 8	87
Tabel 4.14 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 9	91
Tabel 4.15 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 10	94
Tabel 4.16 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 11	97
Tabel 4.17 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 12	100
Tabel 4.18 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 13	102
Tabel 4.19 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 14	105
Tabel 4.20 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 15	108
Tabel 4.21 Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 16	111

Tabel 4.22	Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 17	115
Tabel 4.23	Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 18	118
Tabel 4.24	Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 19	120
Tabel 4.25	Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 20	123
Tabel 4.26	Jawaban Atas Pertanyaan Nomor 21	125



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 3.1 Desain Penelitian	44
Gambar 3.2 Prosedur Pengolahan Data	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Tentang Penetapan Mahasiswa Penyusun Skripsi, Judul Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Pemberian Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Observasi
- Lampiran 5 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 8 Berita Acara Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 9 Berita Acara Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 10 Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses implementasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memuat pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran sebagaimana yang diterapkan di beberapa instansi pemerintahan.

Kecamatan Conggeang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam pengelolaan anggarannya. Keberhasilan pemerintah daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan keuangan tentunya tidak terlepas dari proses perencanaan hingga pelaporan keuangan tersebut berdasarkan apa yang menjadi tujuan dan program yang terdapat di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang tersebut. Selain itu, penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak terlepas pula dari sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung proses sistem tersebut.

Semakin berjalan dengan efektif implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka diharapkan akan memperoleh manfaat, antara lain proses transaksi dan penyiapan laporan lebih cepat, memiliki

keakuratan dalam perhitungan, dapat menyimpan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan lebih rendah, informasi keuangan lebih relevan, transparan, cepat, akurat, lengkap dan dapat di uji kebenarannya. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak akan dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, tentu sangat krusial apabila penganggaran berbasis digital yang sudah baik sistemnya dirusak dengan kompetensi sumber daya manusia yang buruk karena kurang memahami konsep dasar dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Menginjak era reformasi ini, perkembangan demokratisasi politik dan desentralisasi sistem pemerintahan telah membawa gebrakan baru dalam aktivitas birokrasi di Indonesia. Tidak hanya terfokus pada kebijakan politis yang kental akan peran administrator pusat, kebijakan tentang penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah pun menjadi kajian administrasi publik yang mulai mendapat perhatian, baik dari lembaga formal pemerintah, masyarakat, maupun peran pihak *non organizations*, terlebih lagi ketika *Good Governance* menjadi *guidline* utama dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Dalam mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka persoalan pengelolaan keuangan negara dan daerah perlu mendapat perhatian yang seksama. Sehingga, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik terdapat pula tuntutan yang aksentuatif untuk mengakomodasi bahkan mengedepankan *good governance*. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan antara lain transparansi,

akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dimaksud, di samping nilai-nilai efisiensi dan efektivitas.

Dalam konteks yang lebih visioner, pengelolaan keuangan daerah tidak saja harus didasarkan pada prinsip *good governance*, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dimaksud. Pada saat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna (efisien), berhasil guna (efektif), bersih, dan bertanggungjawab. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat segera mewujudkan *good governance* yang ternyata merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah daerah.

Kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Desember 2005 dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ini kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan operasionalnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya untuk menuju *Good Corporate Governace* (GCG) dapat berpedoman pada undang-undang tersebut.

Mengingat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu cara yang diterapkan untuk mewujudkan *Good Governance*

dalam suatu pemerintahan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti sejauhmana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang diterapkan di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Bedasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada belum optimalnya implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang karena masih terdapat beberapa kendala atau masalah dan faktor-faktor lain yang menghambat kelancaran dalam penerapan sistem tersebut. Adapun yang menjadi indikasi-indikasinya adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kantor Kecamatan Conggeang, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih lemahnya konektivitas jaringan yang tersedia. Tidak stabilnya jaringan yang terdapat di Kantor Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang tersebut dapat menyebabkan terhambatnya proses kinerja pegawai dalam penyusunan maupun pelaporan mengenai pengelolaan keuangan tersebut.
2. Masih rendahnya pemahaman pegawai dalam pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sehingga beberapa pegawai yang

bertugas sebagai operator sistem tersebut kurang menguasai mengenai sistem informasi yang digunakan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.”**

B. Fokus Permasalahan

Dari indikasi permasalahan di atas, selanjutnya penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis, meliputi:

- a. Kegunaan bagi Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi suatu masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pendidikan yang ada mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
- b. Kegunaan bagi pemerintah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan masukan dalam pengembangan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

- c. Kegunaan bagi peneliti khususnya diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan penulis mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Hakekat Administrasi Negara

Menurut Dimock and Dimock (dalam Sahya Anggara, 2012: 134) menjelaskan bahwa:

Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian dari ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses.

Selanjutnya, Dimock and Dimock (dalam Sahya Anggara, 2012: 134) menambahkan bahwa “administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.” Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya.

Robbins (dalam Sahya Anggar, 2012: 134) mengemukakan bahwa “*administration in the universal process of vilocioncy getting activities completed with and throught other people* (administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien melalui orang lain).”

Selain itu, Siagian (dalam Sahya Anggara, 2012: 135) memberikan pengertian bahwa “administrasi negara adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, yang terlibat dalam bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sementara itu, Tread seperti yang dikutip Silalahi (dalam Sahya Anggara, 2012: 135) mengemukakan:

Administration is conceived the necessary activities of these individuals (executives) in an organization who charge with ordering, forwarding, and facilitating the associate effort of group of individuals brought together to realize certain defined purpose.

Administrasi meliputi kegiatan individu dalam suatu organisasi yang bertugas bekerjasama sekelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan.

Konsep yang paling baik untuk menjelaskan administrasi negara adalah konsep administrasi negara sebagai suatu proses. Dimock yang dikutip Pramudji (dalam Sahya Anggara, 2012: 136) mengemukakan:

A process it is all the steps taken between the turn in enforcement agency assumes jurisdiction and the lost brick is placed.

Sebagai proses administrasi negara meliputi semua langkah yang diambil di antara saat badan pelaksanaan menerima kewenangan dan saat batu terakhir diletakkan)

Dengan demikian, sebagai proses, administrasi negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai pada penyelenggaraan mencapai tujuan tersebut. Apa yang dinamakan atau disebut administrasi negara dalam ilmu pengetahuan mempunyai beberapa arti, bergantung pada segi pandangannya. Di atas telah diberikan definisi kerja secara singkat mengenai administrasi negara. Menurut Sahya Anggara (2012: 136), administrasi negara mempunyai tiga pengertian pokok, yaitu:

- a. Administrasi negara sebagai fungsi/tugas pemerintah;
- b. Administrasi negara sebagai aparat/aparatur pemerintah;
- c. Administrasi negara sebagai proses teknik pekerjaan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi negara merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Dari rumusan administrasi negara di atas, dapat ditemukan dan dirumuskan ruang lingkup yang merupakan bidang perhatian administrasi negara. Untuk pendekatan secara teoritis, Ramto (dalam Sahya Anggara, 2012: 141) menjelaskan bahwa administrasi negara membahas masalah-masalah yang menyangkut asas-asas:

- a. Dasar administrasi negara (*principles of public administration*);
- b. Organisasi dari kepegawaian negeri (*civil servant*) yang menjadi prasarana administrasi negara;
- c. Hukum administrasi negara yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem administrasi negara yang tunduk pada hukum.

Sedangkan pendekatan secara historis, Ramto (dalam Sahya Anggara, 2012: 142) menjelaskan pendekatan klasik tentang administrasi negara mengalami pergeseran tema pokok dalam perkembangannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Administrasi negara menyangkut teori birokrasi, yang kemudian berkembang menjadi teori administrasi negara. Perkembangan teori birokrasi terbatas pada konsep organisasi, yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengaitkan antara teori organisasi dan teori politik.
- b. Teori administrasi negara dalam tema keduanya menyangkut persoalan efiseinsi dan *economic of scale*. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, administrator harus memperhatikan biaya yang harus

dikeluarkannya. Dengan kata lain, pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan biaya serendah mungkin. Semua usaha reformasi ditunjukan untuk menekan biaya serendah mungkin, selain tujuan lain berupa tingkat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, perlakuan adil dan merata, serta perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan oleh pemerintah.

- c. Tema ketiga teori administrasi negara mengutamakan struktur organisasi secara formal dalam melakukan reformasi administrasi negara. Hal ini menggambarkan kelemahan administrasi negara dapat disempurnakan melalui reorganisasi atas dasar *logical rules* atau asas-asas dasar, antara lain:
 - 1) Menata kembali departemen dalam kelompok yang sama sesuai dengan tujuannya;
 - 2) Mengelompokkan kegiatan-kegiatan serupa dalam satu unit;
 - 3) Menyingkronkan tanggung jawab dengan wewenang;
 - 4) Membekukan satu komando, artinya hanya ada satu pimpinan untuk setiap kelompok karyawan;
 - 5) Membatasi jumlah bawahan agar rentang pengawasan lebih efektif.
- d. Tema keempat menekankan pada personal atau kekaryaan yang awalnya didasarkan pada *meritocracy* atau karyawan kompetensi ketat, kemudian dikembangkan pada sikap pribadinya, pertimbangan insentif, kualitas kepribadian, dan sikap kerja sama dengan rekan kerja.
- e. Tema kelima dari teori administrasi negara menyangkut masalah anggaran keuangan sebagai alat untuk merencanakan, mengambil keputusan dalam bentuk menentukan prioritas dan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi.

Dalam proses operasi administrasi negara terdapat sejumlah unsur yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, apabila salah satunya tidak ada, proses operasi administrasi akan pincang. Sahya Anggara (2012: 29) mengemukakan unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut.

- a. Oranisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
- b. Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas kerja. Hubungan ini meliputi:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pembuatan keputusan;
 - 3) Pembimbingan;
 - 4) Pengoordinasian;
 - 5) Pengawasan (kontrol);

- 6) Penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja.
- c. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.
- d. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan.
- e. Keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Pembekalan, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja.
- g. Tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.
- h. Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama.

Untuk membangun suatu administrasi sebagai suatu sistem diperlukan berbagai unsur (*elements*, elemen), baik berupa faktor-faktor situasional dan kondisional maupun sumber daya-sumber daya (*resource*) tertentu. Selain itu, dalam menjalankan administrasi memerlukan sarana-sarana tertentu. Sarana-sarana yang dipergunakan tersebut menurut Sahya Anggara (2012: 42) yakni:

- a. Organisasi, baik sebagai tertib (*ordering*), struktur, sistem maupun segi-segi lainnya;
- b. Sistem informasi, yang secara lengkap terdiri atas sistem inteligen, sistem tata usaha, dan sistem informasi manajemen (MIS);
- c. Sistem manajemen, yang merupakan paduan sistem personal (*team of managers*) dan sistem *prosessuil* (*set of procedurs*).

Dari uraian di atas mengenai ruang lingkup administrasi negara, dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu negara ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti bagaimana kultur bangsa, partisipasi masyarakat, hukum dan juga proses kebijakannya sehingga semua bisa saling melengkapi dan segala hal yang menjadi tujuan dan harapan negara dapat tercapai.

3. Implementasi Kebijakan Merupakan Bagian Dari Administrasi Negara

Pada hakekatnya keberhasilan di dalam sebuah kebijakan yang paling penting yaitu merencanakan kebijakan dengan baik, begitu juga dengan pengimplementasiannya haruslah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga akan tepat sasaran dan tepat tujuan.

Di dalam ilmu administrasi Negara memiliki ruang lingkup dimana salah satunya yaitu sistem dan proses kebijakan. Sistem dan proses kebijakan dimulai dari merumuskan masalah, prioritas masalah, menentukan kebijakan yang akhirnya pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Donald F. Kettl (dalam Nugroho, 2017: 219) mengemukakan bahwa memasuki millennium ketiga, administrasi publik menghadapi tiga isu kritical yaitu berkenaan dengan struktur administrasi publik dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintahan (*best government is least government*), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Proses administrasi publik yang memperhadapkan kenyataan bahwa sumber defisit terbesar disetiap negara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik;
- b. Nilai, yaitu yang berkenaan antara lain dengan munculnya ikon *entrepreneurial government*; dan
- c. Kapasitas yang berkenaan dengan isu kecakapan dari administrator publik memanajemeni urusan-urusan publik. Disini hendak ditambahkan satu faktor yaitu kebijakan publik.

Henry dikutip oleh Wahyudi Kumoro (dalam Husnan, 2010: 128) mengemukakan bahwa “paradigma terakhir dari administrasi publik adalah bahwa lokus administrasi publik mengenai kepentingan publik (*public interest*) dan urusan

publik (*public affairs*), sedangkan fokusnya adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.”

Selain itu, pada Paradigma ketiga administrasi Negara, Simon (dalam Suwitri, 2014: 12) mempertegas hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik sebenarnya sangat kuat dalam proses perumusan kebijakan negara di mana administrasi negara bertugas menciptakan struktur kondusif pada lembaga pemerintahan dalam rangka implementasi kebijakan negara, sedangkan ilmu politik bertugas menciptakan struktur kondusif pada masyarakat yang dapat membangkitkan perubahan politik dan sosial sehingga implementasi kebijakan negara sesuai yang diharapkan. Pemikiran ini merupakan cikal bakal perkembangan Ilmu Kebijakan Publik.

Menurut Edwards III (dalam Ramdhani dan Ramdhani, 2017: 5) mengemukakan bahwa:

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*).

Sedangkan van Meter and van Horn (dalam Agustiono, 2017: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi sistem sendiri merupakan bagaimana melakukan atau melaksanakan suatu sistem atau kebijakan yang tepat sasaran dan tujuan.

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administrasi Negara yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri merupakan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang dimana dalam proses pengelolaan keuangan tersebut dapat digunakan suatu sistem yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan pusat maupun daerah, dan terciptanya keakuratan data serta transparansi data yang berhubungan dengan proses pengelolaan keuangan untuk mendukung program pembangunan.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Mengenai perumusan kebijakan ini, Dunn (dalam Sahya Anggara, 2012: 499) menjelaskan bahwa secara etimologi, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansakerta, dan Latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansakerta yaitu *polis* (negara kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara), dan akhirnya dalam bahasa Inggris *police* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Selain itu, kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. Pada hakekatnya proses kebijakan adalah serangkaian alur yang perlu dilalui untuk memahami gejala atau fenomena yang diselesaikan oleh sebuah atau lebih

kebijakan publik. Selain itu, proses kebijakan juga merupakan proses politik dan selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Adapun pengertian kebijakan menurut Dye (dalam Agustiono, 2017: 15) yaitu:

Kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu.

Menurut Anderson (dalam Sahya Anggara, 2012: 500), “Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.”

Hal tersebut senada dengan Jenkins dikutip oleh Wahab (dalam Sahya Anggara, 2012: 500) yang mengemukakan bahwa “Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.”

Selanjutnya, Friedrick dikutip oleh Wahab (dalam Sahya Anggara, 2012: 501) menjelaskan bahwa:

Kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian putusan dan kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Easton (dalam Agustiono, 2017: 15-16) menjelaskan bahwa “Kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik.”

Menurut Adnerson (dalam Agustiono, 2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Jenkins (dalam Agustiono, 2017: 16-17) menjelaskan bahwa kebijakan publik:

A set of interrelated decision taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actors to achieve.

Jenskin memandang kebijakan publik sebagai sebuah proses. Bahkan lebih jelas lagi, Jenskin menyatakan kebijakan publik sebagai “serangkaian keputusan yang saling berhubungan.” Dalam kata lain, Jenskin hendak menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*.

Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015: 64) mengemukakan bahwa, kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian putusan dan kegiatan pemerintah yang memiliki sasaran tertentu dalam pencapaian tujuan yang kemudian dikembangkan oleh pejabat pemerintah.

3. Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan disebut juga dengan istilah perumusan kebijakan. Merujuk Sidney (dalam Agustiono, 2017: 97), formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Ini artinya, formulasi kebijakan menjadi langkah awal penting karena memberikan informasi pada para analis kebijakan dan *decision-makers*.

Selain itu, yang harus dipahami adalah perumusan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang telah diagendakan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, metode, atau resep yang dalam hal ini berupaya untuk menyelesaikan suatu masalah publik.

Thomas (dalam Agustiono, 2017: 98-99) menyatakan bahwa formulasi kebijakan akan bersinggungan dengan empat hal:

- a. *Appraisal activity*, di mana data dan bukti diidentifikasi dan digunakan untuk menjadi *baseline* bagi perumusan kebijakan;
- b. *Dialogic activity*, suatu mekanisme diskusi dan komunikasi yang dilakukan di antara para aktor pembuat kebijakan yang mempunyai cara pandang berbeda satu dengan yang lain bersinggungan dengan;
- c. *Formulation or assessment activity*, merupakan ini perumusan kebijakan yang memperhitungkan juga lingkungan, budaya, Tarik ulur kepentingan aktor-aktor pembuat kebijakan, dan lainnya yang berujung pada ketersediaan alternatif kebijakan; dan

- d. *Consolidation phase*, merekomendasikan satu alternatif kebijakan yang kelak dituangkan dalam produk kebijakan publik.

Jones (dalam Agustiono, 2017: 100) mengemukakan bahwa untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang komprehensif ada beberapa hal yang perlu dicermati, seperti:

- a. Jumlah masalah yang ditangani. Apakah usulan kebijakan akan menyelesaikan seluruh masalah dalam suatu lingkup masalah? Ataukah perhatiannya hanya ditunjukkan pada kasus tertentu saja?
- b. Lingkup analisis. Apakah lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani semua aspek masalah? Ataukah hanya melayani aspek-aspek tertentu?
- c. Memperkirakan dampak. Apakah usulan kebijakan yang diformulasi diuji semua dampaknya? Ataukah pengujian dibatasi pada dampak langsung dalam suatu lingkup isu tertentu saja?

Kriteria-kriteria tersebut di atas menyarankan suatu kemungkinan yang luas serta komprehensif dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif lain, Islamy (dalam Agustiono, 2017: 100) menyatakan bahwa perumusan usulan kebijakan yang baik dan komprehensif akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para analis kebijakan dalam merumuskan masalah kebijakan (*problem structuring*) itu sendiri. Dan untuk membuat suatu perumusan kebijakan yang komprehensif ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para analis kebijakan:

- a. Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan;
- b. Mengidentifikasi dan merumuskan alternatif;
- c. Menilai masing-masing alternatif yang tersedia; dan
- d. Merumuskan dan memutuskan alternatif kebijakan yang *visible* untuk dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan atau disebut juga sebagai perumusan kebijakan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan keputusan. Untuk merumuskan suatu putusan atau kebijakan tersebut tentunya harus memperhatikan beberapa hal sebelum putusan tersebut ditetapkan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau putusan yang akan ditetapkan.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Edwards III (dalam Ramdhani dan Ramdhani, 2017: 5), mengemukakan bahwa:

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*).

Menurut Winarno (2016: 146) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Lester dan Stewart, Op Cit (dalam Winarno, 2016: 147) mengemukakan bahwa:

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor,

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program

Menurut van Meter and van Horn (dalam Agustiono, 2017: 128)

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Agustiono (2017: 128) menjelaskan bahwa “implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.”

Sementara itu, Howlett and Ramesh (dalam Agustiono, 2017: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, “*The process whereby programs or policies are carried out; it donated the translation of plans into practice.*” Di mana definisi keduanya ini sejalan dengan tulisan Barrett (dalam Agustiono, 2017: 128) yang menyatakan implementasi kebijakan sebagai “*translating policy into action* (menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan).”

Dari beberapa tafsiran seperti tertuang di atas, menurut Agustiono (2017: 128-129) dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni: (i) adanya tujuan atau sasaran, (ii) adanya aktivitas atau, dan (iii) adanya hasil. Namun ini saja belum cukup, karena implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh para implementer dalam pelaksanaan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan perlulah konsep atau rencana dalam menentukan cara yang paling efektif dan efisien sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Adapun model implementasi kebijakan diantaranya sebagai berikut.

a. Model Edward III

Model implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Agustiono, 2017: 136-137) mengatakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, diantaranya sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula;

- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu);
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

2) Sumber Daya

Sumber daya yang akan mendukung implementasi kebijakan yang efektif terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri;
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan;
- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik;
- d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III, adalah:

- a) Efek disposisi;
- b) Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dan
- c) Insentif.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana adalah sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:

- a) Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel; dan
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b. Model van Meter and van Horn

Model pendekatan menurut van Meter and van Horn (dalam Agustiono, 2017: 133-135) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.
- 2) Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
- 4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
- 5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

c. Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle (dalam Agustiono, 2017: 143-145) ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

- 1) *Content of Policy*
 - a) *Interst Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

- b) *Type of Benefit* (tipe manfaat), berupaya menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan). Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
 - e) *Program Implementor* (pelaksana program). Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
 - f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan). Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- 2) *Context of Policy*
- a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
 - b) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa). Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
 - c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Hal lain yang dianggap penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk pengukuran yang dilakukan dalam pengimplementasian kebijakan yang dimana dalam implementasi kebijakan

tersebut meliputi beberapa hal yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan dan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Hambatan Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994: 149-154), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan
Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- b. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlihat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- c. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian Potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Dari uraian di atas mengenai hambatan implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan implementasi kebijakan meliputi faktor-faktor yang menyebabkan tidak atau kurang efektifnya penerapan kebijakan publik di suatu pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.

Dalam hubungannya dengan keberlakuan hukum, maka agar suatu peraturan perundang-undangan sapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian empat unsur. Sunggono (1994: 157-158) mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan

atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya dengan memperbaiki sikap implementor, menjelaskan dengan baik mengenai implementasi kebijakan tersebut sehingga implementor dapat memahami implementasi kebijakan. Selain itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan implementasi kebijakan publik tentunya upaya yang dilakukan terlebih dahulu disesuaikan berdasarkan permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang terjadi.

D. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilaksanakan, penulis mengukurnya dengan melihat implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang ada di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Indrayani dan Gatningsih (2013: 187) Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) yang kemudian dikembangkan menjadi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) sebagaimana dikutip oleh Sofwan, dkk (2014: 37) menjelaskan bahwa:

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah paket sistem informasi yang mengintegrasikan fungsi bisnis manajemen keuangan daerah di organisasi Pemerintahan Daerah, yang berfungsi sebagai alat bantu instansi tersebut untuk meningkatkan efisiensi penerapan berbagai regulasi bidang manajemen keuangan daerahnya dengan asas efisiensi, efektif, akuntabel dan auditable.

Selain itu, berdasarkan Modul Aplikasi dari Departemen Dalam Negeri dalam Yusup (2016:152) menyatakan bahwa, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.

Sedangkan menurut Ansharullah (2017:63), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Menurut Indrayani dan Gatningsih (2013: 188) terdapat beberapa fungsi aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, yaitu:

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses implementasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Kajian terdahulu membantu peneliti memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinilitasnya. Peneliti akan mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian meringkasnya baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum (jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan langkah ini, maka dapat terlihat sejauh mana orsinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Di bawah ini disajikan tabel kajian teori terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti saat ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. (Rosmery Elsy. 2013. Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri).	Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Objek Penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.	Pemungutan terhadap BPHTB yang didasarkan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang disebabkan adanya hibah wasiat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2000 dimana dalam pelaksanaan pemungutan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Sedangkan dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya kendala yang berhubungan dengan wajib pajak, seperti ketidaktahuan wajib pajak dan kendala yang berhubungan dengan perhitungan seperti perhitungan terhadap hibah wasiat yang diterima bersama.
2.	Evaluasi Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan	Implementasi Sistem Informasi	Objek penelitian di Pemerintah	Studi ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang

	Implementasi SIPKD Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. (Muhammad Sofwan, dkk. 2014. STMIK AMIKOM, Yogyakarta).	Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).	Kabupaten Tana Toraja.	berkontribusi terhadap kesuksesan implementasi SIPKD di Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja. Selain itu, studi ini memperlihatkan signifikansi sebuah dukungan kesuksesan implementasi SIPKD, mengungkap pentingnya memperhatikan budaya organisasi dalam mendukung kesuksesan implementasi SIPKD, serta memberikan sebuah gambaran bagaimana faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan implementasi <i>Enterprise Systems</i> terbukti merupakan faktor yang berpengaruh di dalam kesuksesan implementasi SIPKD di Kabupaten Tana Toraja.
3.	Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pendekatan Model Penerimaan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).	Objek penelitian di Pemerintah Daerah Provinsi Riau.	Keberhasilan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) membutuhkan peran persepsi kemudahan pengguna dan persepsi manfaat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi

Provinsi Riau. (Y. Rahmat Akbar dan Mar'aini. 2020. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda).			Riau yang terdiri atas Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat Daerah, dengan Bendaharawan (<i>end users</i>) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) selaku pihak verifikator. Keberhasilan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki pengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
--	--	--	--

Dari kajian penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa judul yang penulis ambil mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang berbeda dengan kajian penelitian terdahulu. Dalam kajian terdahulu membahas tentang: seperti apa pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan seperti apa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sedangkan, dalam kajian yang penulis buat membahas mengenai bagaimana pengimplementasian dari suatu kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

F. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Instrumen Penelitian

1. Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian dalam Ilmu Administrasi Negara yang dapat dipahami dari dua perspektif. Pertama, perspektif politik yaitu bahwa kebijakan publik di dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif yaitu bahwa kebijakan publik merupakan hal-hal yang berkaitan dengan sistem, prosedur, mekanisme, serta kemampuan pejabat publik (*official offers*) di dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.

Dengan memahami kebijakan publik dari dua perspektif tersebut, maka dapat diketahui bahwa kebijakan publik pada hakekatnya terkait dengan peran Negara sebagai suatu organisasi publik dalam menghadapi berbagai permasalahan publik yang harus diatasi, dikurangi, atau dicegah guna mewujudkan tujuan (*goals*).

Edwards III (dalam Ramdhani dan Ramdhani, 2017: 5), mengemukakan bahwa:

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*).

Sedangkan van Meter and van Horn (dalam Agustiono, 2016: 128)

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Proses implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan, karena keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan dapat dilihat dari tahap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, implementasi kebijakan adalah perwujudan secara nyata dari kebijakan yang telah diformulasikan agar diperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang perlu dilakukan pengkajian secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumber daya, proses disposisi, dan kejelasan struktur birokrasi.

Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Edward III (dalam Agustiono, 2017: 136-137), yang dimana teori tersebut

menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi, dan
- d. Struktur birokrasi.

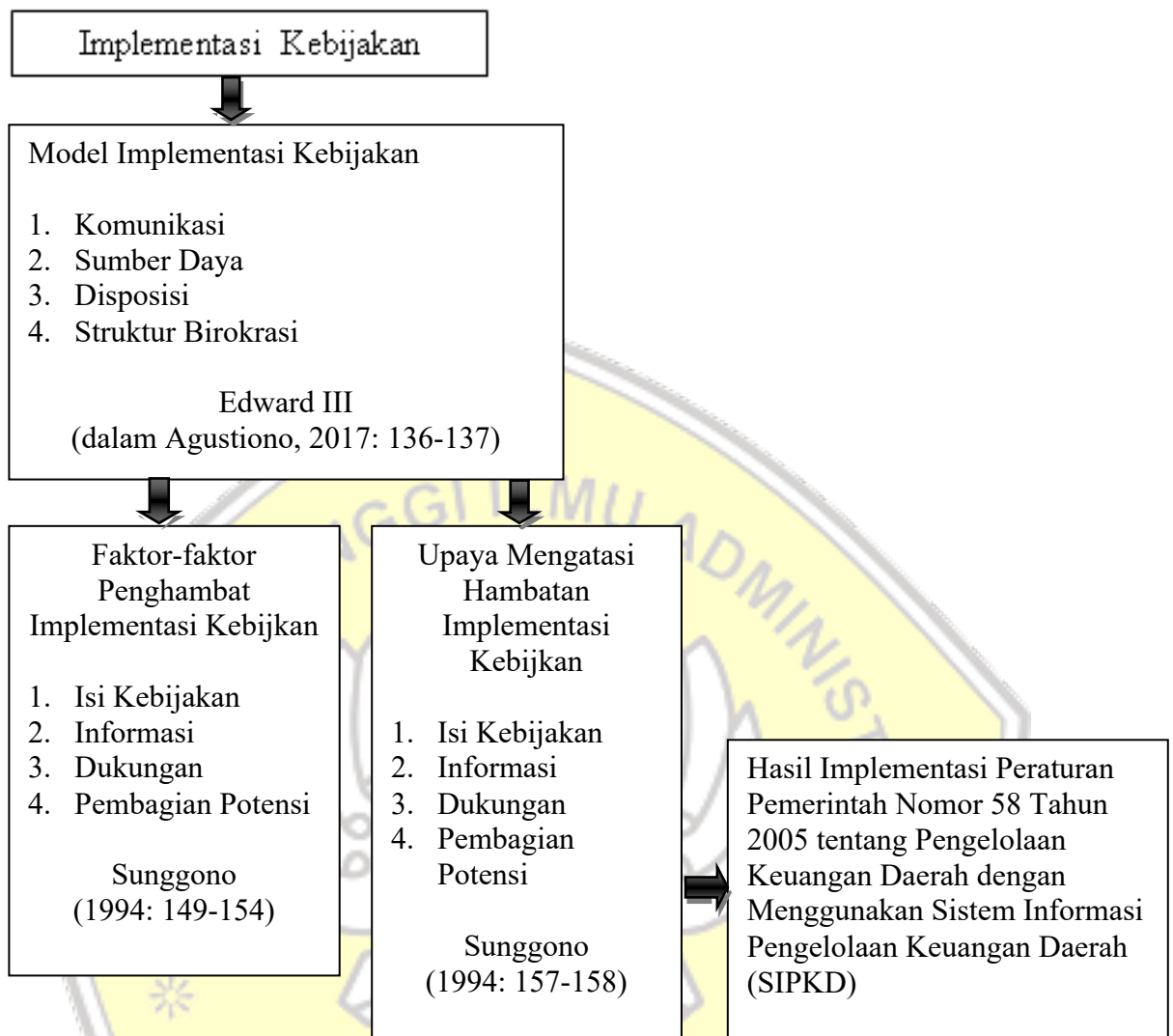
Dari proses implementasi kebijakan melalui empat dimensi tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dan upaya dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Menurut Bambang Sunggono (1994: 149-154), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat dan upaya, yaitu:

- a. Isi kebijakan
- b. Informasi
- c. Dukungan
- d. Pembagian Potensi

Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikendaki oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan publik sesungguhnya bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis menuangkan pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti membuat kisi-kisi instrumen penelitian untuk digunakan sebagai bahan pengamatan secara langsung pada objek penelitian mengenai variabel penelitian. Instrumen penelitian ini diperlukan untuk mengatasi masalah penelitian yang belum dapat terpecahkan

serta untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada objek penelitian, sehingga mempermudah menemukan solusi permasalahan.

Dari instrumen ini, untuk mempermudah serta memberi ruang lingkup penelitian, penulis menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No.	Fokus Teori	Dimensi	Indikator	No. Item
1	Implementasi Kebijakan Sumber: Edward III (dalam Agustiono, 2017: 136-137)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas a. Pemahaman b. Komitmen a. Ukuran dasar kerja b. Koordinasi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2	Hambatan Implementasi Kebijakan sumber: Sunggono (1994: 149-154)	1. Isi Kebijakan 2. Informasi 3. Dukungan 4. Pembagian Potensi	a. Ketidakjelasan maksud dan tujuan b. Kekurangan sumber-sumber daya pembantu a. Ketidakjelasan informasi a. Kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan a. Pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau pembatasan-pembatasan yang kurang jelas	12 13 14 15 16

3	Upaya untuk mengatasi kendala dalam Implementasi Kebijakan Sumber: Sunggono (1994: 157-158)	1. Isi Kebijakan	a. Ketidakjelasan maksud dan tujuan	17
			b. Kekurangan sumber-sumber daya pembantu	18
		2. Informasi	a. Ketidakjelasan informasi	19
		3. Dukungan	a. Kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan	20
		4. Pembagian Potensi	a. Pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau pembatasan-pembatasan yang kurang jelas	21



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sementara metode penelitian bertugas memberikan gambaran atas bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Metode penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Selain itu, metode penelitian juga merupakan analisis teori mengenai suatu cara atau metode.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Pengertian metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017: 9) yaitu:

Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif tersebut di atas, digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Bachri (2010: 50) sebagai berikut:

Dalam penelitian kualitatif, obyek dan masalah penelitian mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan mengenai pendekatan, desain ataupun metode penelitian yang akan diterapkan. Tidak semua obyek dan masalah penelitian bisa didekati dengan pendekatan tunggal, sehingga diperlukan pemahaman pendekatan lain yang berbeda agar

begitu obyek dan masalah yang akan diteliti tidak pas atau kurang sempurna dengan satu pendekatan maka pendekatan lain dapat digunakan, atau bahkan mungkin menggabungkannya.

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Menurut Bachri (2010: 51-52) ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Latar alamiah. Penelitian kualitatif dilaksanakan pada latar alamiah, atau seting asli atau pada konteks suatu kenyataan.
2. Manusia sebagai alat (instrumen). Dalam penelitian kualitatif sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
3. Metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu:
 - a. Penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda;
 - b. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; dan
 - c. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
4. Analisis data secara induktif. Analisis data secara induktif digunakan dengan pertimbangan:
 - a. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data;
 - b. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit dan dapat dikenal;
 - c. Analisis induktif dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada latar lainnya;
 - d. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan; dan
 - e. Analisis induktif dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.
5. Teori dan dasar (*grounded theory*). Peneliti berangkat ke lapangan dalam keadaan kosong, tidak menduga-duga lebih dahulu keadaan di lapangan. Setelah sampai di lapangan, peneliti mempercayai apa yang dilihat sehingga ia harus berusaha benar-benar menjadi netral. Dalam hal ini peneliti tidak berasumsi bahwa sudah cukup yang diketahui untuk memahami bagian-bagian penting sebelum mengadakan penelitian.
6. Deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tingkah laku, perbuatan, gambar, dan bukan angka-angka.

7. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas bila diamati dalam proses. Peran proses dalam penelitian kualitatif besar sekali.
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Bagaimanapun, penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting, artinya dalam menemukan batas penelitian. Bila tidak ada pembatas berdasarkan fokus, maka penelitian akan dapat melantur tidak ada batas berhentinya.
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Peneliti harus lebih dulu meredifikasikan validitas, objektivitas, dan keabsahan data.
10. Desain yang bersifat sementara. Penelitian kualitatif harus menyusul desain penelitian secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, jadi tidak dapat menggunakan desain yang disusun secara ketat dan kaku.
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. hasil penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data.

Dengan pendekatan kualitatif, maka diharapkan akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, sehingga menghasilkan kredibilitas yang tinggi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan secara deskriptif dengan melakukan analisis terhadap suatu objek alamiah.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dapat menggambarkan langkah-langkah desain penelitian yaitu sebagai berikut.

Indikasi Masalah:

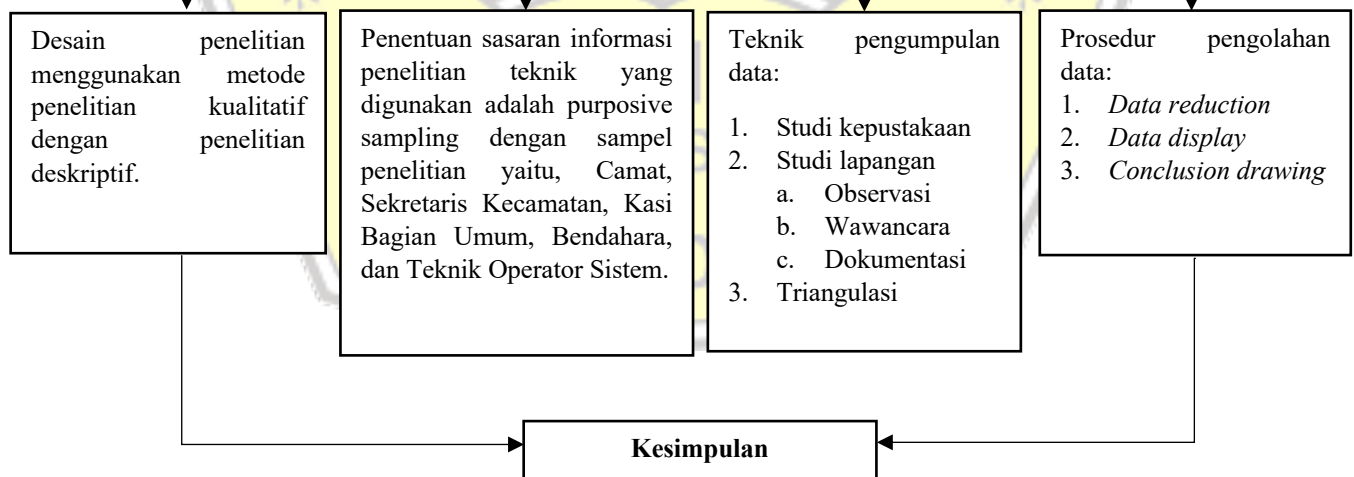
1. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kantor Kecamatan Conggeang, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih lemahnya konektivitas jaringan yang tersedia. Tidak stabilnya jaringan yang terdapat di Kantor Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang tersebut dapat menyebabkan terhambatnya proses kinerja pegawai dalam penyusunan maupun pelaporan mengenai pengelolaan keuangan tersebut.
2. Sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai dampak dari kesulitan untuk dapat masuk ke dalam sistem.
3. Masih rendahnya pemahaman pegawai dalam pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sehingga beberapa pegawai yang bertugas sebagai operator sistem tersebut kurang menguasai mengenai sistem informasi yang digunakan.

Fokus Permasalahan:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?

Model Teori Yang Digunakan:

1. Faktor utama yang menentukan implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Agustiono, 2017: 136-137), yaitu: (a) Komunikasi, (b) Sumber Daya, (c) Disposisi, dan (d) Struktur Birokrasi.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Sunggono (dalam Isnaini, dkk, 2014: 713-714), yaitu: (a) Isi Kebijakan, (b) Informasi, (c) Dukungan, dan (d) Pembagian Potensi.
3. Upaya-upaya untuk mengatasi penghambat implementasi kebijakan menurut Sunggono (dalam Isnaini, dkk, 2014: 713-714), yaitu: (a) Isi Kebijakan, (b) Informasi, (c) Dukungan, dan (d) Pembagian Potensi.



Gambar 3.1
Desain Penelitian

Penelitian ini yang diamati adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Dengan digunakan metode kualitatif, maka diharapkan data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Selain itu, dengan metode kualitatif ini diharapkan akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti, sehingga dapat memiliki kredibilitas yang tinggi.

B. Penentuan Sasaran, Informan dan Narasumber Penelitian

1. Penentuan Sasaran

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu beradapan dengan objek yang diteliti baik berupa manusia, benda maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakteristik objek, penelitian ini disebut objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (dalam Sugiyono, 2017: 215) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi.

Penentuan sasaran dan informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, dalam hal ini yaitu informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan

menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang berjumlah 36 orang, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	ASN (Aparatur Sipil Negara)	17 Orang
2	Non ASN	19 Orang
	Total (Orang)	36 Orang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diperoleh jumlah sasaran penelitian sebanyak 36 orang yang merupakan pegawai di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Peneliti mengambil sejumlah orang tersebut didasarkan pada pertimbangan yang bersangkutan berkompeten terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

2. Informan dan Narasumber Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data diperoleh dari informan. Informan merupakan pegawai yang benar-benar memahami permasalahan dengan argument mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2017: 218-219), “*Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Artinya, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah mereka yang ada hubungannya dengan proses implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Adapun yang menjadi informan penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Unsur	Jumlah
1	Camat	1 Orang
2	Sekretaris Kecamatan	1 Orang
3	Kasubag Program dan Keuangan	1 Orang
4	Bendahara	1 Orang
5	Pelaksana Sistem/Operator Sistem	1 Orang
	Jumlah	5 Orang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diperoleh jumlah informan penelitian sebanyak 5 orang berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan sangat berkompeten terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka, dengan itu dalam penelitian ini data-data yang diperoleh bersumber dari:

1. Studi kepustakaan

Yaitu merupakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2. Studi lapangan

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan meneliti secara mendalam yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan mengenai objek yang diteliti dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan aktivitas Tanya jawab secara langsung dengan koresponden (pihak-pihak yang terkait dalam penelitian).
- c. Dokumentasi, yaitu pencatatan suatu objek yang diteliti serta diolah, sehingga menjadi sekumpulan barang bukti yang dapat ditampilkan apabila dibutuhkan.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun suara.

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2017: 241) “Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.” Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti, peneliti menggunakan teknik yang mengumpulkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan semata-mata mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.

D. Prosedur Pengolahan Data

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting dari model Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 246), yaitu:

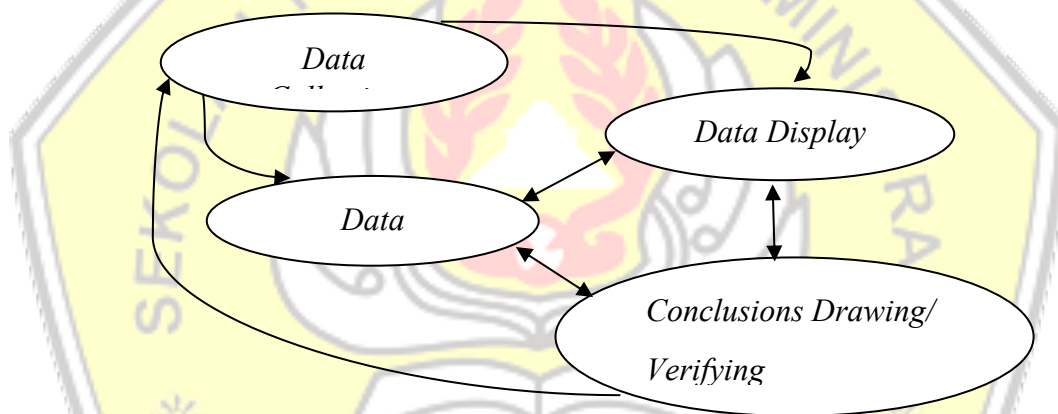
1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis merangkum hasil wawancara dari informan.
2. *Data Display* (Penyajian Data)
Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data hasil wawancara dengan memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis penelitian atau teori.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis data tersebut di atas menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 246) digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.2
Prosedur Pengolahan Data

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dari mulai bulan November 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, berikut disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data yang diterima oleh peneliti, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil observasi, wawancara dan juga hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.
2. Beberapa faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaannya adalah faktor kurangnya sumber-sumber pendukung seperti fasilitas atau sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, serta pemahaman pelaksana yang belum optimal mengenai implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

3. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yaitu dengan meningkatkan fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut, memberikan pembinaan, study banding, motivasi atau dorongan terhadap para pelaksana guna menambah wawasan atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

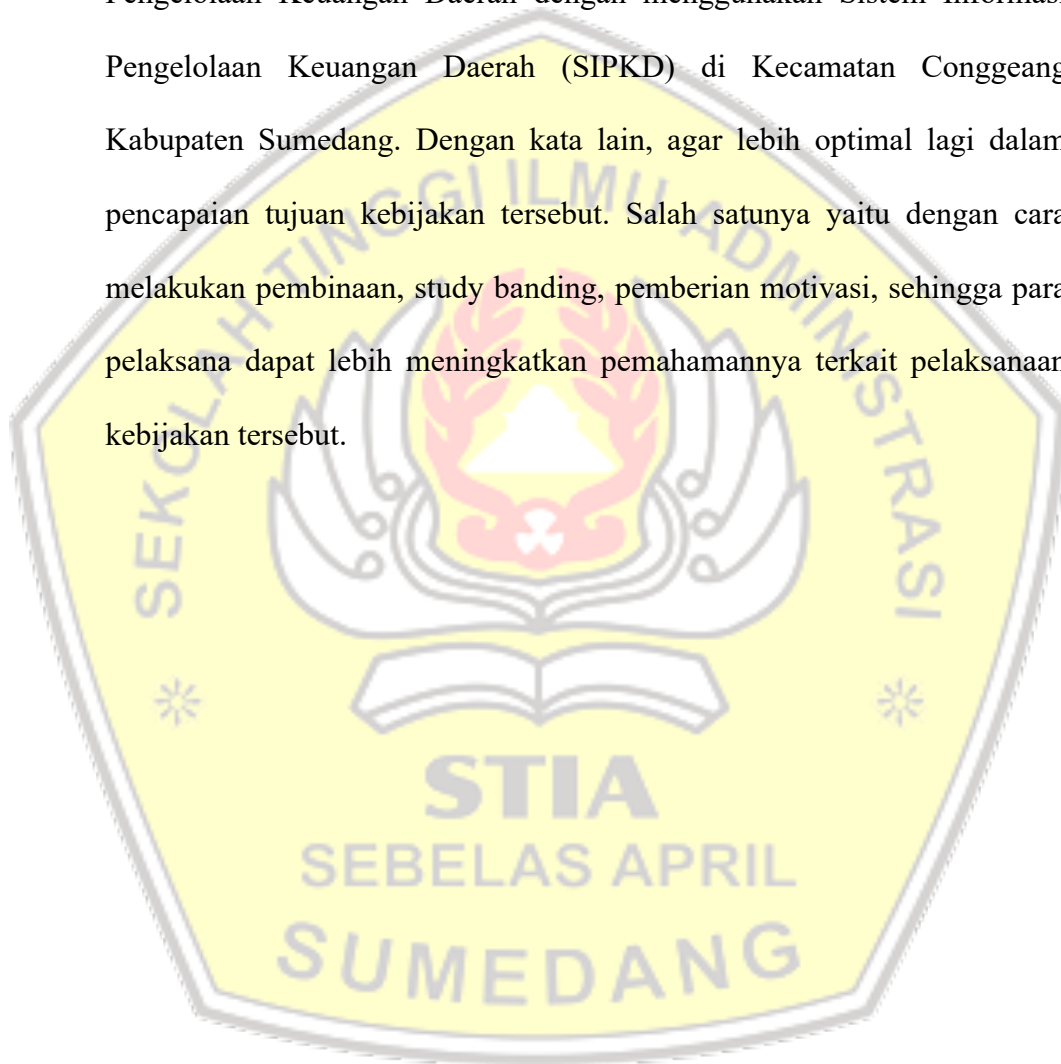
B. Saran

Saran untuk penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya peningkatan mengenai fasilitas atau sarana dan prasarana pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang guna lebih optimal lagi dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan menambah atau

memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana komputer guna membantu pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Perlu adanya peningkatan pemahaman bagi para pelaksana terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Dengan kata lain, agar lebih optimal lagi dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan pembinaan, study banding, pemberian motivasi, sehingga para pelaksana dapat lebih meningkatkan pemahamannya terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agustiono Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Indriyani Etin, Gatningsih. (2013). *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda*. Bandung: IPDN PRESS.
- Nurwan, T. M. (2019). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) BERBASIS WEB. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 4(2), 22-32. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/40>
- Nugroho Riant. (2017). *Public Policy: Edisi 6*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Purwanto. EA. Dyah Ratih S. (2015). *Implementasi Kebijakan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno Budi. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru

B. Jurnal

- Ansharullah Khalifah. (2017). *Pengaruh Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros*. *Jurnal Riset* Edisi XV, 3(4), 61-69.
- Aska Ahmad H. (2010). *Etika Administrasi Publik: Perannya Dalam Mewujudkan Good Governance*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(2), 127-132.
- Bachri Bachtiar S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62.

Ramdhani Abdullah, MA Ramdhani. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.

Rosmery Elsy. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Jurnal Otonomi Keuangan Daerah, 1(1), 1-84.

Sofwan Muhammad, dkk. (2014). *Evaluasi Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi SIPKD Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Tona Raja*. Seminar Nasional Teknologi dan Multimedia, 2(1), 37-42.

Suwitri Sri. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka, 2(351), 1-51.

Y. Rahmat Akbar, Mar'aini. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pendekatan Model Penerimaan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(1), 92-101.

Yusup Maulana. (2016). *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, 10(2), 149-160.

C. Dokumen

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.



